



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL RAHIM**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **459480**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.025.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
4. Tanah Seluas 621 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000		
5. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
6. Tanah Seluas 268 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	245.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR R2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
2. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	170.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	79.276.810



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.519.276.810
III. HUTANG	Rp.	216.832.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.302.444.810

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.